

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Pada Tahun Politik 2018)

Financial Performance Analysis of DKI Jakarta Provincial Government (Case Study in Political Year 2018)

Abstrak

¹I Made Dwi Hita Darmawan

¹ Sistem Informasi Akuntansi, Universitas Primakara, Indonesia.

Surel Korespondensi:
dwihiita@primakara.ac.id

Tahun 2018 adalah tahun politik pergantian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan segala dinamikanya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan pemerintah di era Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang baru menjabat sebagai kepala daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder diperoleh dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2018 yang dapat diakses pada laman website ppid.jakarta.go.id. Analisis data menggunakan perhitungan rasio: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah; (2) Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah; (3) Rasio Aktivitas; (4) Rasio *Debt Service Coverage Ratio* (DCSR); dan (5) Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong tinggi dengan persentase sebesar 242,65%; (2) Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah tergolong cukup efektif dengan persentase 98%; (3) Rasio Aktivitas, pada rasio ini, aktivitas pemerintah lebih dominan pada rasio belanja rutin sebesar 106% daripada rasio belanja modal yang hanya 32%; (4) Rasio *Debt Service Coverage Ratio* (DCSR) sebesar 506,32% mencerminkan pemerintah memiliki kemampuan membayar pinjaman yang baik; serta (5) Rasio Pertumbuhan mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebesar -1,31% dan pendapatan -5,54% dibandingkan pertumbuhan belanja operasi sebesar 18,4% dan belanja modal 28%.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Rasio, Politik, Pemerintah, APBD

Abstract

2018 is a political year for the change of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta with all its dynamics. The purpose of this study is to analyze the financial performance of the government in the era of DKI Governor Anies Baswedan and Deputy

Governor Sandiaga Uno who just served as regional heads. The research method uses a descriptive quantitative approach with secondary data obtained from the 2018 DKI Jakarta Regional Budget (APBD) data which can be accessed on the ppid.jakarta.go.id website page. Data analysis using ratio calculations: (1) Regional Financial Independence Ratio; (2) Regional Original Revenue Effectiveness Ratio; (3) Activity Ratio; (4) Debt Service Coverage Ratio (DCSR); and (5) Growth Ratio. The results showed: (1) The Regional Financial Independence Ratio is high with a percentage of 242.65%; (2) The Regional Original Income Effectiveness Ratio is quite effective with a percentage of 98%; (3) Activity Ratio, in this ratio, government activity is more dominant in the routine expenditure ratio of 106% than the capital expenditure ratio which is only 32%; (4) The Debt Service Coverage Ratio (DCSR) of 506.32% reflects the government's ability to pay good loans; and (5) The Growth Ratio experienced a decrease in local revenue of -1.31% and revenue of -5.54% compared to growth in operating expenditure of 18.4% and capital expenditure of 28%.

Keywords: Financial Performance, Ratio, Politics, Government, APBD

PENDAHULUAN

Upaya nyata guna menghadirkan akuntabilitas diikuti transparansi secara konkret dan komprehensif merujuk ke ranah tata kelola uang pemerintah yang sifatnya daerah hingga pusat ialah melalui mekanisme sajian laporan pertanggungjawaban dengan korelasinya perincian atas kajian pendanaan yang ada. Konteks ini menjadi wujud konkret atas pertanggungjawaban yang secara gamblang dan detail telah diatur sedemikian rupa melalui payung hukum UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Nilai laporan keuangan terutama digunakan untuk menganalisis kesehatan keuangan, menitikberatkan atas penilaian dari perspektif efisiensi sekaligus efektivitas dalam lembaga yang merepresentasikan laporan, sekaligus memberi bantuan atas penentuan tindakan taat pada landasan konstitusi yang berlaku. Tidak dapat dipungkiri jika bahasan mengenai pelaporan atas pendanaan yang ada menjadi komponen wajib demi kelancaran penilaian atas nilai sumber daya ekonomi yang dilibatkan dalam implementasi menyeluruh setiap dinamika tingkah laku pemerintah yang mengantongi wewenangnya. Perlu dipahami jika pihak pemerintah daerah memiliki kewajiban penuh dalam realisasi sajian atas pelaporan pendanaan atas pemerintah yang bersangkutan selanjutnya diakronimkan menjadi LKPD dengan mekanisme penyusunan mengarah ke SAP alias Standar Akuntansi Pemerintahan dibarengi korelasi atas representasi atas maksud dari akuntabilitas juga transparansi dari setiap uang yang dikelola untuk mengimplementasikan pemerintahan dengan benar-benar bersih (Lamaya, 2021; Susilowati et al., 2021; Yasin, 2020). Lebih lanjut dipaparkan jika keadaan pendanaan pada entitas yang melakukan tindakan pelaporan dibarengi transaksi yang berlangsung pada periode tertentu

diwujudkan skema perincian melalui sajiannya dengan detail. Eksistensi atas pelaporan yang melibatkan pendanaan menjadi alat pokok untuk melancarkan proses penganalisisan atas status uang yang beredar, diikuti evaluasi dengan lebih efektif juga efisien, diikuti pemberian bantuan dalam pemutusan penetapan sifat taat atas hukum dan aturan. Selain itu, dilibatkan juga guna melangsungkan penilaian atas sumber daya ekonomi yang memang benar-benar dibutuhkan guna mewujudkan serangkaian fungsi yang termaktub pada ranah pemerintahan.

Berlanjut ke penggunaan alat yang perannya layaknya tolok ukur demi kepentingan evaluasi atas kinerja yang melibatkan uang daerah merujuk pada temuan pada skema penganalisisan rasio keuangan. Ini dijabarkan lebih detail menyangkut unsur kemandirian atas uang tersebut dalam usaha mewujudkan pembiayaan atas terselenggaranya berbagai aktivitas pemerintahan, di samping itu, mengedepankan efisiensi dan juga efektivitas ketika mengimplementasikannya, sekaligus menitikberatkan atas kapasitas tindakan pihak pemerintah daerah ketika mengalokasikan dana, berlanjut ke persoalan kontribusi di tiap-tiap sumber pendapatan ranah kedaerahan, sekaligus implikasi atas bertumbuh dan berkembangnya serah terima dan pengalokasian yang keluar di periode yang sudah ditentukan (Halim, 2012). Berbeda dengan sektor swasta yang sudah sering digunakan, analisis rasio keuangan belum banyak digunakan di institusi publik, khususnya pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh kendala bagaimana laporan keuangan disajikan dalam organisasi yang ada sangkutpautnya dengan pemerintah daerah dengan dibarengi sifat beserta tujuan yang tentunya tidak sama bersamaan dengan hal tersebut ada sajian pelaporan pendanaan di ranah lembaga usaha yang labelnya swasta. Pencapaian tujuan lebih diberi bobot dalam evaluasi efektivitas APBD sebagai ukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan perubahan komposisi atau struktur APBD kurang mendapat perhatian (Nasution, 2019; Setiawan et al., 2018; Yandra et al., 2018).

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 menjadi sorotan utama dalam kancah politik Indonesia. Pemilihan ini memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap berbagai elemen masyarakat, termasuk iklim politik dan ekonomi di daerah tersebut, selain menjadi peristiwa politik yang krusial. Laporan kinerja keuangan pemerintah adalah salah satu elemen yang terkait erat dengan pemilihan gubernur. Kesehatan keuangan dan kinerja pemerintah daerah sebagian besar terungkap melalui laporan kinerja keuangan pemerintah. Ini mencakup pendapatan, pengeluaran, investasi, utang, dan stabilitas keuangan secara umum. Laporan kinerja keuangan pemerintah mungkin memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana publik memandang kandidat dan partai politik yang bersaing dalam konteks pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Persaingan yang ketat di antara beberapa kandidat dari berbagai partai politik menandai iklim politik pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Masyarakat secara aktif memeriksa dan menilai kinerja pemerintahan saat ini selama masa kampanye, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Laporan kinerja keuangan pemerintah menjadi salah satu sumber pengetahuan penting yang digunakan pemilih untuk menilai kapasitas kandidat dalam mengawasi keuangan negara dan melayani tuntutan masyarakat (Lestari, 2019).

Dinamika politik pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 berpotensi berdampak pada laporan kinerja keuangan pemerintah karena berbagai hal. Pertama, kepercayaan publik terhadap kandidat dan partai politik yang mendukungnya dapat meningkat dengan adanya pengungkapan keuangan yang akurat dan terbuka. Hal ini dapat mendorong pemilih untuk lebih mendukung kandidat gubernur. Kedua, laporan kinerja keuangan pemerintah juga dapat menyoroti keberhasilan yang telah dicapai dan pandangan ke depan. Popularitas dan

elektabilitas calon gubernur yang dianggap bertanggung jawab atas kinerja keuangan pemerintah dapat meningkat jika laporan tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang solid, manajemen keuangan yang cerdas, dan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Di sisi lain, politisi yang mencalonkan diri melawan tandingannya dapat menggunakan statistik kinerja keuangan pemerintah yang lemah atau kontroversial sebagai bahan untuk kampanye negatif. Citra kandidat gubernur yang berafiliasi dengan partai politik yang sedang berkuasa dapat terpengaruh jika terdapat tanda-tanda keuangan yang tidak sehat, seperti defisit anggaran yang besar, peningkatan utang yang besar, atau aktivitas yang tidak etis (Faedlulloh & Wiyani, 2019).

Ada berbagai alasan kuat untuk melakukan penelitian ini. Sistem pemerintahan DKI Jakarta secara tidak langsung menjadi model bagi pemerintahan lainnya karena beberapa faktor. Pertama, status yang lekat dengan sebutan ibu kota Indonesia menjadikan DKI Jakarta secara eksistensi menarik perhatian seluruh penduduk. Kedua, tahun 2018 merupakan tahun politik di mana Anies Baswedan menggantikan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur. Kedua, menarik untuk diperhatikan bahwa sebelum kepemimpinan Anies Baswedan, pemerintah DKI Jakarta mengalami pasang surut dalam status pelaporan yang melibatkan uang pihak pemerintah dengan pihak lain selaku pelimpahnya yakni BPK RI, di mana sejak tahun 2010, opini yang diraih bervariasi, yaitu pada tahun 2010 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tahun 2011-2012 sorotan atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan kemudian di periode 2013-2016 kembali memperoleh WDP (Liputan 6, 2022). Sementara itu, pemerintah DKI memperoleh WTP secara terus menerus dari tahun 2017 hingga 2022. Ketiga, penelitian ini melengkapi gap dari penelitian sebelumnya, seperti Amal dan Wibowo (2022) yang meneliti kinerja keuangan DKI Jakarta pada konteks sebelum COVID-19 dan sesudah COVID-19. Selain itu, penelitian dari Nur dan Rakhman (2019) meneliti pada konteks PDRB sektor ekonomi DKI Jakarta, fokusnya pada sektor perdagangan ekonomi Jakarta. Penelitian sebelumnya terkait politik dilakukan oleh Lestari (2019) yang fokus meneliti pada konteks pilkada, politik dan dinamikanya. Bagaimana situasi gejolak politik yang terjadi serta stigma yang muncul akan pertanggungjawaban kinerja sebagai kepala daerah. Beranjak dari penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, penelitian ini memberi keterbaruan dalam memenuhi gap penelitian untuk meneliti kinerja keuangan dibalut dalam fenomena politik yang secara spesifik menelisik pada tahun politik panas 2018. Oleh karena itu, melalui penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan spesifik terkait pengamatan atas bagaimana kinerja keuangan pemerintah DKI Jakarta di tahun 2018, yang juga merupakan tahun pemilihan kepala daerah yang menarik perhatian banyak masyarakat Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2018, yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menjadi dasar dari data statistik tersebut. Di situs web resmi pemerintah DKI Jakarta, ppid.jakarta.go.id, pengguna dapat memperoleh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

TINJAUAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintahan

APBD cakupannya begitu kompleks, termasuk di dalamnya yakni rangkuman atas daftar perolehan pendapatan daerah diikuti pengalokasiannya yang ditetapkan dalam periode tahunan. Penting dipahami ketika merunut ketentuan konstitusi diterangkan jika anggaran

pendapatan dan juga keperluan pembelanjaan pada suatu daerah diperuntukkan bagi kurun waktu 12 bulan dengan permulaannya 1 Januari sampai 31 Desember di tahun tersebut. Hal tersebut memiliki acuan konstitusional yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2014 terkait Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD tercatat menjadi representasi atas rencana pendanaan dengan periodenya tahunan pihak pemerintah daerah yang diupayakan pembahasan secara maksimal dibarengi kata sepakat bermaksud menyetujuinya dengan melibatkan DPRD sekaligus Pemerintah di daerah setempat. Tujuan dari sistem penilaian kinerja entitas publik ialah memberi bantuan kepada pihak manajer publik untuk keperluan skema evaluasi atas pencapaian rencana dengan melibatkan teknik khas dalam ranah keuangan maupun yang tidak. Ukuran atas kinerja yang diperuntukkan bagi entitas yang sifatnya publik ini diwujudkan dengan melibatkan tiga dasar alasan, salah satu pokoknya yakni peningkatan atas kinerja pihak pemerintah yang seharusnya bisa dijalankan dengan maksimal (Eko Budi Lestari, 2021; Ikhsan Setiawan et al., 2020; Khatulistiwa, 2021). Lebih lanjut dipaparkan kalau ada tujuan terselubung atas ukuran kinerja itu digalakkan yakni memberikan bantuan untuk pihak pemerintah supaya bisa lebih mengedepankan fokus untuk meraih apa saja yang telah diputuskan sebagai target atas program di unit pekerjaan terkait. Dalam jangka panjang, konteks demikian akan memberikan efek peningkatan dengan efektivitas sekaligus efisiensi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk mengalokasikan sumber daya dan membuat pilihan, badan-badan publik menggunakan metrik kinerja. Ketiga, metrik kinerja badan publik bertujuan untuk meningkatkan komunikasi kelembagaan dan akuntabilitas publik (Heriston Sianturi & Anastasya Astrid Eka Putri, 2018; Syukri & Hinaya, 2019).

Satu dari banyaknya ukuran yang bisa dilibatkan atas penilaian kecakapan suatu daerah ketika mengimplementasikan otonomi daerahnya yakni bertalian dengan apa yang dimaksud dengan kinerja keuangan dari segi kedaerahan (Halim, 2012). Dalam konteks ini pihak pemerintah daerah memberikan kewajiban atas pembuatan laporan yang berimplikasi pada pola penanggungjawaban pendanaan di wilayah daerah guna mengulik secara lebih dalam terkait keberhasilan perwujudan setiap poin yang dilimpahkan sebagai bentuk amanah selaku pihak khusus yang memang memiliki tanggung jawab terkait skema terselenggaranya pemerintahan, berlanjut ke representasi pembangunan, diikuti juga dengan wujud layanan sosial yang diperuntukkan bagi layanan sosial ke masyarakat meluas. Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan akuntabilitas kinerja keuangan, pemerintah daerah yang mandiri harus menyajikan gambaran yang jelas mengenai kinerjanya (Angelina et al., 2020; Dona & Lestari, 2020; Hafandi & Romandhon, 2020; Prastiwi & Aji, 2020; Siagian, 2020). Masyarakat harus dapat mengakses informasi yang transparan dari evaluasi kinerja tersebut agar pihak-pihak yang memang terlibat mengenai kepentingan atas tata kelola kinerja pendanaan yang menjurus ke ranah daerah. Pengungkapan atas laporan yang berkaitan dengan penanggungjawaban tersebut sudah sepatutnya dilakukan penyusunan dengan mengacu pada standarisasi yang termaktub pada bidang perakuntansian pemerintahan sekaligus yang juga pentingnya yakni disampaikan tepat waktu agar tercipta keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Dona & Lestari, 2020; Hafandi & Romandhon, 2020).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Otonomi keuangan rujukannya yakni kapasitas pihak pemerintah daerah itu sendiri guna melangsungkan upaya pendanaan berbagai proyek yang berkorelasi dengan unsur

pembangunan, kemudian ada pula kaitannya dengan inisiatif pihak pemerintah, sekaligus wujud konkret layanan yang sengaja diperuntukkan bagi masyarakat meluas dengan melibatkan mekanisme pungutan pajak beserta retribusi di tiap-tiap daerah yang menjadi satu dari banyaknya sumber dana itu diperoleh. Sementara untuk kajian PAD dengan standarisasi komparasi dengan pendapatan di daerah yang telah didapatkannya dengan melibatkan aneka sumber lain, mulai dari transferisasi dari pusat atau taktik pinjaman, menjadi sinyal kalau dana daerah yang bersangkutan dikatakan sudah mandiri (Halim, 2012). Derajat mandiri di tiap daerah, yang mana dalam konteks ini melibatkan pengukuran atas rasio mandiri memberi petunjuk lain berupa tingkatan rasa bergantung pada aneka sumber yang asalnya dari luar, terlebih yang asal-muasalnya yakni pihak provinsi atau pemerintah paling pusat. Pola bergantung demikian nampaknya bisa diupayakan penurunannya sejalan dengan tingkat mandiri di daerah tersebut terus melaju tinggi, begitu juga mekanisme kebalikannya. Sedangkan untuk persentase rasa mandiri bisa juga menjadi petunjuk terkait derajat keterkaitan daerah pada ranah pembangunannya. Bagaimanapun juga, masyarakat yang mengerahkan kontribusi konkretnya melakukan pembayaran dengan wujud pungutan pajak serta retribusi di daerahnya yang menempati lading penghasilan dominan daerah tersebut, ini mengalami peningkatan yang dibarengi dengan rasio mandiri itu juga melejit. Tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan jumlah pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan.

Tabel 1. Tingkat Kemandirian Dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (0%)
Rendah sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Perlu dipahami jika daya kecakapan pihak pemerintah daerah dalam usaha menghadirkan penghasilan riilnya didambakan bisa diupayakan skema komparasi dengan melibatkan target sesuai ketentuan diikuti dasarnya yakni potensi actual dengan representasinya mengarah ke unsur rasio efektifitas. Jika rasio tersebut minimal 1 (satu) atau 100%, maka kemampuan daerah tersebut dianggap efektif (Halim, 2012).

Tabel 2. Kriteria Efektifitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektifitas (%)
Sangat efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90% - 99%
Kurang efektif	75% - 89%

Tidak efektif	<75%
---------------	------

Rasio Aktivitas

Bahasan terkait rasio ini merepresentasikan mekanisme pihak pemerintah daerah bisa mengupayakan sistem pengalokasian setiap dana demi kepentingan pembelanjaan secara rutin sekaligus unsur lain yang konteksnya mengacu ke pembangunan. Lebih lanjut dipaparkan untuk proporsi anggaran kepentingan berinvestasi yang keterlibatannya diperuntukkan bagi kepentingan pembangunan infrastruktur perekonomian pihak masyarakat meluas mengalami perwujudan komparasi yang berkebalikan dibarengi kuantitas rupiah yang dilimpahkan melalui pembelanjaan rutin tersebut. Ini dilandasi oleh kompleksitas yang bersifat dinamis terkait investasi juga pembangunan yang menjadi kebutuhan guna meraih hasil terkait pertumbuhan secara komprehensif, tidak bisa ditampik kalau saat ini masih belum ada pedoman yang dipakemkan terkait totalitas rasio pembelanjaan yang rutin atau pembelanjaan yang menjurus ke modal (Halim, 2012).

Rasio Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Berlanjut ke bahasan rasio DSCR yang mengupayakan perbandingan atas keseluruhan penerimaan dana yang asli dari daerah yang bersangkutan, berlanjut ke bagian daerah yang bersumber dari berbagai hal mulai dari skema PBB, perolehan atas SDM, hingga pendapatan dari pengalokasian umum selepas diselisihi atas biaya yang menjadi kebutuhan dengan berbagai totalan dari cicilan yang sifatnya pokok, atau bunga serta pinjaman lain yang sudah tiba tenggat waktunya. Dengan demikian, bisa disampaikan ketika rasio melebihi 2,5 atau 250%, maka rasio DSCR dianggap baik (Halim, 2012).

Rasio Pertumbuhan

Kajian yang menjurus ke rasio pertumbuhan dilibatkan demi kepentingan pengukuran atas daya pemerintah di lingkup kedaerah dalam usaha melakukan pertahanan sekaligus memaksimalkan pendokumentasian atas keberhasilan kinerja seiring waktu berjalan. Keadaan demikian menghadirkan probabilitas guna menjadi penentu atas setiap kemungkinan yang wajib dikaji ketika pertumbuhan itu terjadi di tiap komponen sumber yang ranahnya ke pengeluaran ataupun perolehan dana dapat dipahami (Halim, 2012).

METODE

Riset ini melibatkan metode khusus yakni pendeskripsian dengan basis kuantitatif, yakni mewujudkan kalkulasi pada keseluruhan data finansial yang didapatkan demi kepentingan *problem solving* yang memang menjadi urgensi bersama sejalan dengan poin penting atas tujuan riset. Studi ini menitikberatkan pada pemahaman atas Kinerja Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun politik 2018 dilihat dari perhitungan berbagai rasio keuangan pemerintah. Kajian ini dilaksanakan melalui tahap mencari serangkaian data yang sifatnya sekunder dengan melakukan himpunan dari berbagai sumber, termasuk laporan laporan realiasi APBD DKI Jakarta tahun 2018 melalui website ppid.jakarta.go.id. Sedangkan untuk kategori objek yang dilibatkan yakni pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Analisis data menggunakan beberapa analisis rasio keuangan daerah Halim (2012) pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Rasio	Rumus	Skala
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Bantuan Pusat} + \text{Pinjaman}}$	Rasio
Rasio Efektifitas Keuangan Daerah	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan PAD}}$	Rasio
Rasio Aktivitas	Rasio Belanja Rutin: $\frac{\text{Belanja Rutin/Operasi} \times 100\%}{\text{Total APBD}}$ Rasio Belanja Modal: $\frac{\text{Belanja Modal} \times 100\%}{\text{Total APBD}}$	Rasio
Rasio Debt Service Coverage Ratio (DCSR)	$\frac{\text{PAD} + \text{Dana Bagi Hasil} + \text{DAU} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$	Rasio
Rasio Pertumbuhan	$\frac{\text{PAD}_{t1} - \text{PAD}_{t0} \times 100\%}{\text{PAD}_{t0}}$	Rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Politik Tahun 2018

Kesehatan keuangan pemerintah memiliki dampak langsung pada iklim politik dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Karena DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah yang memainkan peran ekonomi dan politik yang sangat penting di Indonesia, maka pemilihan ini mendapat perhatian luas. Dalam situasi ini, kinerja keuangan pemerintah menjadi salah satu elemen kunci dalam menarik perhatian pemilih dan mempengaruhi persepsi mereka terhadap kandidat yang bersaing. Manajemen anggaran termasuk satu dari banyaknya unsur krusial yang mendatangkan pengaruh seberapa baik kondisi uang yang menjurus ke pihak pemerintah selama pemilihan gubernur. Anggaran pemerintah adalah instrumen penting untuk mewujudkan kebijakan dan inisiatif yang direncanakan oleh para kandidat gubernur (Faedlulloh & Wiyani, 2019). Para pemilih akan menilai rencana para kandidat dalam mengelola dan mengalokasikan dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Laporan kinerja keuangan pemerintah memberikan akuntabilitas dan transparansi selain pengelolaan anggaran. Kemampuan pemerintah untuk berkomunikasi secara jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana publik akan ditunjukkan kepada publik. Kepercayaan publik terhadap kandidat yang mereka dukung akan meningkat jika pengungkapan keuangan pemerintah jelas dan didukung dengan baik. Selain itu, unsur ekspansi ekonomi juga termasuk dalam kinerja keuangan pemerintah. Masyarakat umum akan menilai kemampuan kandidat gubernur untuk menumbuhkan lingkungan bisnis yang baik dan mendorong ekspansi ekonomi di DKI Jakarta. Popularitas para kandidat akan didukung oleh laporan kinerja keuangan yang menunjukkan perkembangan ekonomi yang positif, pendapatan yang lebih baik, dan tingkat pengangguran yang lebih rendah (Hafandi & Romandhon, 2020).

Faktor selanjutnya dalam menentukan pembangunan infrastruktur dan kebijakan pembangunan adalah kinerja keuangan pemerintah. Kemampuan kandidat gubernur untuk menggunakan dana untuk meningkatkan infrastruktur saat ini dan membangun infrastruktur baru yang diperlukan akan dievaluasi oleh para pemilih. Peluang kandidat untuk memenangkan pemilihan akan ditingkatkan dengan laporan kinerja keuangan yang menunjukkan dedikasi dan pencapaian dalam pembangunan infrastruktur. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa laporan kinerja keuangan yang kurang baik dari pemerintah juga dapat berdampak buruk pada pemilihan gubernur. Reputasi gubernur terpilih dan partai-partai politik yang terkait dengannya akan terpengaruh jika terdapat tanda-tanda ketidakseimbangan anggaran, perilaku tidak jujur, atau administrasi yang tidak efisien.

Gubernur Anies menyatakan bahwa ada banyak kajian yang harus dilakukan ketika ia mulai menjabat pada tahun 2018 (Liputan 6, 2022). Pihaknya bekerja tanpa henti, termasuk untuk meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Anies menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mendapatkan Opini WTP 5 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), mulai tahun 2017 dan terus berlanjut hingga akhir masa jabatannya. Menurut Anies, para pegawainya sudah mulai terbiasa bekerja dengan cepat untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi setelah tahun 2018 yang penuh dengan tuntutan dan padat karya. Dimana Anies mengklaim telah membentuk rutinitas kerja yang sukses untuk Jakarta untuk menjadikan Opini WTP sebagai kebiasaan dan budaya, setelah berakhirnya masa jabatan dirinya sebagai gubernur. Anies mendapatkan pengetahuan pada tahun 2019 dan terus menjadi lebih efektif. Setelah lima tahun, prosedur ini telah melembaga, dan kebiasaan telah berkembang sebagai hasilnya.

Analisis Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai sendiri kegiatan operasional, perbaikan, dan pelayanan kepada masyarakat setelah memungut pajak dan retribusi disebut sebagai kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal). Ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan dari luar, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi, juga ditunjukkan oleh besarnya rasio kemandirian.

Tabel 4. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2018	43.327.136.602.811	17.855.177.072.924	-	242,65%

Sumber: APBD DKI Jakarta 2018, data diolah

Berlandaskan atas paparan tabel di atas, didapatkan rasio kemandirian dengan besarnya yakni 242,65%. Ini menegaskan kalau tingkat kemandirian keuangan Pemrov DKI Jakarta sangat tinggi bahkan melampaui indikator persentase tinggi antara 75%-100%.

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Kapasitas Pemprov guna menghadirkan PAD yang sejalan dengan harapan dilakukan komparasi terkait target yang menjadi ketetapan dengan dasar potensi aktual pada daerah yang

dilibatkan dijabarkan dengan rasio efektivitas.

Tabel 5. Perhitungan Rasio Efektifitas

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)
2018	44.350.077.858.844	43.327.136.602.811	98%

Sumber: APBD DKI Jakarta 2018, data diolah

Sejalan dengan paparan tabel di atas didapatkan persentase atas rasio efektivitas yakni 98%. Ini menegaskan kalau pemprov DKI Jakarta cukup efektif dalam pengelolaan PADnya.

Rasio Aktivitas

Rasio ini menegaskan terkait mekanisme Pemprov bisa melakukan alokasi dana untuk kepentingan belanja secara rutin atau yang mengarah ke persoalan pembangunan. Adapun persentase belanja investasinya yang memang dibutuhkan guna kepentingan infrastruktur perekonomian masyarakat menyeluruh dengan perbandingan terbalik dengan mengaitkannya dengan keseluruhan uang tunai yang tersedia untuk kepentingan pembelanjaan rutinnya.

Tabel 6. Perhitungan Rasio Keserasian (Belanja Rutin dibanding Total APBD)

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Total APBD (Rp)	Rasio Belanja Rutin (%)
2018	46.943.316.200.855	44.350.077.858.844	106%

Sumber: APBD DKI Jakarta 2018, data diolah

Tabel 7. Perhitungan Rasio Keserasian (Belanja modal dibanding Total APBD)

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total APBD (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2018	14.118.608.087.643	44.350.077.858.844	32%

Sumber: APBD DKI Jakarta 2018, data diolah

Berlandaskan atas paparan tabel, didapatkan rasio untuk perbelanjaan rutin dengan besarnya yakni 106%, sedangkan untuk rasio belanja modalnya yakni 32%. Ini menegaskan kalau Pemprov DKI Jakarta memiliki kecenderungan atas prioritas pada belanja operasinya ketimbang modalnya.

Rasio *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

Rasio DSCR mengupayakan komparasi secara menyeluruh atas PAD, termasuk bagian daerah atas PBB, perolehan pendapatan yang berasal dari SDM, sekaligus pendanaan alokasi umum selepas pengurangan biaya yang memang dibutuhkan, berlandaskan atas totalitas cicilan pokok, juga bunga dan provisi, serta pinjaman yang sudah memasuki tenggat waktu.

Tabel 8. Rasio *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

Keterangan	2018 (Rp)
PAD	43.327.136.602.811
Dana Bagi Hasil Pajak	15.026.197.590.222
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	183.375.491.488
Dana Alokasi Khusus	2.645.603.991.214
Jumlah	61.182.313.675.735
Belanja Pegawai	21.852.416.650.509
Angsuran Pokok Hutang	33.629.623.430
Belanja Bunga	44.048.569.889

Jumlah	77.678.193.319
Rasio DSCR	506,32%

Sumber: APBD DKI Jakarta 2018, data diolah

Berlandaskan uraian tabel di atas, didapatkan rasio DSCRnya yakni 506,32%. Temuan demikian menegaskan jika Pemrov DKI Jakarta sudah sangat baik karena telah melebihi dua kali lipat dari batas minimal 2,5/250% rasio DSCR.

Rasio Pertumbuhan

Bahasan ini melibatkan pengukuran atas kapasitas pihak pemerintah dalam usaha melakukan pertahanan sekaligus pemaksimalan catatan untuk mendatangkan keberhasilan seiring waktu berjalan. Perlu dipahami kalau pertumbuhan itu bisa diketahui maka setiap komponen yang tergabung dengan sumber pendapatan juga pengeluarannya, individu tertentu bisa melangsungkan skema pemilihan atas probabilitas yang seharusnya dijadikan perhatian kajian.

Tabel 9. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Rasio Pertumbuhan PAD (%)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%)
2017	43.901.488.807.743	64.823.887.369.820	-	-
2018	43.327.136.602.811	61.235.824.747.633	-1,31%	-5,54%

Sumber: APBD DKI Jakarta 2018, data diolah

Tabel 10. Rasio Pertumbuhan Belanja

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi (%)	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal (%)
2017	39.660.198.435.607	11.045.723.233.626	-	-
2018	46.943.316.200.855	14.118.608.087.643	18,4%	28%

Sumber: APBD DKI Jakarta 2018, data diolah

Sejalan dengan tabel yang dikemukakan di atas, terkait rasio pertumbuhan PAD dan pendapatan dinyatakan mengalami tren yang sifatnya menjurus ke negative dengan persentasenya yakni -1,31% serta -5,54%. Sementara di satu sisi, untuk rasio pertumbuhan belanja operasinya memperoleh persentase 18,4% dan untuk rasio pertumbuhan untuk belanja modalnya di angka 28%. Ini menegaskan kalau PAD mengalami penurunan sedangkan keseluruhan pendapatan tahun sebelumnya membuat rasio pertumbuhan PAD dan perolehan dananya cenderung mengarah ke negative. Begitupun sebaliknya, terkait belanja operasinya dan modalnya di tahun demikian (2018) lebih besar ketimbang di tahun sebelumnya, sehingga kedua rasio tersebut jadi dominan. Melalui Halim (2012) diterangkan jika pendapatan itu bisa diberi label baik ketika ada pertumbuhan atas pendapatan yang sifatnya positif dengan tren peningkatan secara masif. Ketika negative terjadi pada pertumbuhan, ini menjadi bahan renungan bersama kalau kinerja akan pendapatan justru menurun. Hal tersebut direpresentasikan kalau Pemprov DKI Jakarta dinyatakan belum bisa menghadirkan kinerja terkait pendapatan yang belum bisa dilabeli baik. Ketika kontribusi pada PAD tinggi, menandakan kemampuan pemerintah daerahnya juga tinggi dari segi kapasitas kecakapan penyelenggaraan desentralisasi secara optimal.

Politik dan Kinerja Pemerintah: Pembuktian Raihnya Predikat WTP

Melalui laporan keuangan yang sudah dilaksanakan oleh BPK tahun 2018, pihak pemerintah DKI Jakarta telah dinyatakan berhasil memperoleh peringkat atas Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Setiap pemerintah daerah mendambakan predikat WTP karena hal ini menunjukkan tingkat akuntabilitas, transparansi, dan disiplin pengelolaan keuangan. Pencapaian kriteria WTP oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan efektivitas gubernur dan tim pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Masyarakat semakin percaya terhadap pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah ketika laporan keuangannya transparan, dapat dipercaya, dan diperiksa secara independen oleh BPK.

Dalam hal ini, penerimaan predikat WTP oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan posisi gubernur dan pemerintahannya. Pencapaian ini akan dilihat oleh masyarakat sebagai bukti bahwa gubernur DKI Jakarta telah menangani uangnya dengan bijak, menjauhi perilaku yang tidak etis, dan berkonsentrasi untuk menggunakan uang pajak demi kepentingan masyarakat. Selain itu, predikat WTP dapat membantu meminimalisir stigma atau kesan kurang baik yang dapat berkembang di tahun 2018 akibat campur tangan politik. Dinamika politik daerah sering kali dipengaruhi oleh pemilihan umum, terutama pemilihan presiden dan parlemen. Ketegangan dan perpecahan dapat terjadi akibat persaingan politik yang sengit, bahkan dalam hal mengevaluasi efektivitas pemerintah daerah.

Pihak Pemerintah DKI Jakarta dapat menyampaikan perihal kinerjanya dalam mengelola keuangan tetap terjaga dan tidak terlalu terpengaruh oleh campur tangan politik di tahun 2018 dengan mendapatkan predikat WTP (Liputan 6, 2022). Masyarakat dapat merasa lebih aman dengan mengetahui bahwa pemerintah berkomitmen untuk memenuhi tugasnya dan menawarkan layanan publik yang berkualitas tinggi sebagai hasilnya. Sangat penting untuk diingat bahwa faktor-faktor lain, selain predikat WTP, juga memengaruhi seberapa baik fungsi gubernur dan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Pencapaian ini hanya merepresentasikan manajemen keuangan yang efektif; kinerja pemerintah juga harus dinilai dengan menggunakan metrik lain, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, peningkatan standar hidup masyarakat, dll.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berlandaskan atas temuan penganalisan di atas, bisa ditarik simpulan kalau rasio mandiri atas dana di suatu daerah, berlanjut ke rasio efektivitas, aktivitas, hingga DSR menegaskan jika temuan yang terbilang baik serta sudah melakukan pemenuhan atas standarisasi kinerja uang ranah kedaerahan. Kendati demikian, untuk rasio pertumbuhan memerlukan pencatatan khusus. Hal demikian mengacu ke PAD dan pertumbuhan atas pendapatan terjadi insiden yang sifatnya negative ketimbang pertumbuhan yang merujuk ke belanja operasional dan modal condongnya mengalami kenaikan. Lebih lanjut pihak pemerintah khususnya daerah DKI Jakarta perlu menaruh konsen terkait peningkatan PAD dan memerhatikan penyebab turunnya hal tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah masyarakat maupun para pemangku kepentingan haruslah objektif dalam menilai kinerja. Isu yang terlempar dipublik acapkali mempengaruhi pandangan terhadap personal maupun instansi tertentu yang cenderung bermuatan negatif imbas dari pertarungan politik. Temuan ini

memberi ikhtiar bahwa tanggungjawab kinerja yang ditunggu-tunggu masyarakat secara transparan dan akuntabel dapat dibuktikan dengan hasil audit BPK RI yang menyatakan bahwa laporan keuangan APBD DKI Jakarta 2018 memperoleh peringkat atas WTP. Temuan dalam studi ini bisa dijadikan acuan dan bahan evaluasi pemerintah selanjutnya untuk mempertahankan predikat WTP ini dan menetapkan program prioritas pada APBD dengan mengacu pada tingkat kemampuan daerah.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, adapun beberapa poin terkait pemberian saran bisa disampaikan berikut: (1) pihak pemerintah DKI Jakarta ada baiknya mengerahkan segenap fokusnya dalam usaha pemaksimalan kinerja guna meningkatkan perolehan dana terkait PAD. Mengingat kebutuhan akan urusan perbelanjaan secara operasional maupun modal menempati peringkat yang terbilang mendominasi. Ketika perbedaan itu muncul dengan taraf signifikan di rasio pertumbuhan akan pendapatan yang didapatkan; (2) Perbelanjaan rutin bisa diminimalkan, sedangkan untuk peningkatan lebih mengarah ke belanja pada unsur modal yang dilibatkan; (3) Terkait rasio efisiensi tidak perlu dilakukan fokus pengkajian dalam kaitannya dengan penganalisisan mengingat bisa saja ada kendala yang menjurus ke persoalan pendataan yang mewajibkan penginputan atas biaya pungutan terkait PAD yang tidak teridentifikasi di ranah pelaporan riil dari anggaran. Ini sejalan dengan gagasan yang dilontarkan Mahmudi (2010) data tambahan sangat dibutuhkan terlebih yang eksistensinya tidak ada di pelaporan implementasi atas anggaran guna pengulikan informasi biaya pungutan perihal PAD. Penelitian ke depan dapat meneliti dan melengkapi dengan mengukur pada rasio efisiensi; serta (4) Penelitian ini tidak spesifik membahas mengenai intrik politik yang terjadi, sebaliknya penelitian ini menggunakan studi kasus pada tahun 2018 yang secara kebetulan menjadi tahun politik yang menyita banyak perhatian masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan studi komparatif terkait data APBD di era gubernur sebelumnya serta dapat mengaitkan dengan program-program prioritas pemerintah pada APBD dan keterkaitannya dengan situasi politik terkini misalnya pemilihan presiden, demonstrasi, hingga kasus-kasus korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama, penulis berterimakasih kepada Prof. Abdul Halim (Guru Besar FEB Universitas Gadjah Mada) telah memberi tuntunan dan pemahaman mengenai perspektif akuntansi sektor publik khususnya sektor pemerintahan untuk mengupas kinerja keuangan pemerintah. Kedua, penulis berterimakasih kepada Universitas Primakara yang telah memberi dukungan moril dalam proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83–93. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1723>
- Angelina, N., Efni, Y., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengawasan Sebagai Variabel

- Moderating Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018. *Bahtera Inovasi*, 4(1), 36–53. <https://doi.org/10.31629/bi.v4i1.2757>
- Dona, E. M., & Lestari, V. A. (2020). ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN OKU. *BALANCE: JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 5(2), 135. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i2.2877>
- Eko Budi Lestari. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFOCUSING DAN REALOKASI APBD TAHUN ANGGARAN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(3), 593–606. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i3.478>
- Faedlulloh, D., & Wiyani, F. (2019). Promote Good Governance in Public Financial: The Practice of Local Budget (APBD) Transparency Through Open Data Jakarta in Jakarta Provincial Government. *Jurnal Good Governance*, 15(1). <https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.41>
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Heriston Sianturi, & Anastasya Astrid Eka Putri. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten). *Jurnal Liabilitas*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v3i1.29>
- Ikhsan Setiawan, M., Durrotun Nasihien, R., Mohammad Razi, M. A., & Ting, I.-H. (2020). Sustainable Mobility, Maritime, Airport, and Regional Government Revenue and Expenditure (APBD). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 498(1), 012111. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/498/1/012111>
- Khatulistiwa, A. (2021). THE EFFECT OF BUDGET REFOCUSING DURING THE COVID-19 PANDEMIC ON THE REALIZATION OF THE APBD IN CENTRAL JAVA PROVINCE. *MARGINAL: JOURNAL OF MANAGEMENT, ACCOUNTING, GENERAL FINANCE AND INTERNATIONAL ECONOMIC ISSUES*, 1(1), 65–71. <https://doi.org/10.55047/marginal.v1i1.89>
- Lamaya, F. (2021). Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pada Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan di Pengadilan Tinggi Agama Kupang. *Monex: Journal of Accounting Research*, 10(2), 224–230. <http://dx.doi.org/10.30591/monex.v10i2.2642>
- Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(4), 12–16.
- Liputan 6. (2022). *Pemprov DKI Raih Opini WTP 5 Kali Beruntun, Anies Cerita Banyak PR dari Era Sebelumnya*. <https://www.liputan6.com/news/read/4975292/pemprov-dki-raih-opini-wtp-5-kali-beruntun-anies-cerita-banyak-pr-dari-era-sebelumnya>
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nasution, D. A. D. (2019). Pengaruh Kualitas Aparatur dan Skema Pengendalian Internal terhadap Antisipasi Korupsi Berjamaah dalam Pelaksanaan APBD dengan Integritas sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Benefita*, 4(3), 464. <https://doi.org/10.22216/jbe.v4i3.4347>
- Nur, I., & Rakhman, M. (2019). ANALISIS PDRB SEKTOR EKONOMI UNGGULAN PROVINSI DKI JAKARTA. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(4), 351–370. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v4i4.132>

- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DANA KEISTIMEWAAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>
- Setiawan, M. I., Hasyim, C., Kurniasih, N., Abdullah, D., Napitupulu, D., Rahim, R., Sukoco, A., Dhaniarti, I., Suyono, J., Sudapet, I., Nasihien, R., Wulandari, D., Reswanda, Mudjanarko, S., Sugeng, & Wajdi, M. (2018). E-Business, The impact of the Regional Government Development (APBD) on Information and Communication Development in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1007, 012045. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1007/1/012045>
- Siagian, A. onny. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA TRANSFER TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL. *Jurnal Bisnis Terapan*, 4(2), 141–158. <https://doi.org/10.24123/jbt.v4i2.2848>
- Susilowati, D., April Dayanti Sitinjak, C., & Juwari, J. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH KOTA BALIKPAPAN. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(1), 115–126. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v12i1.149>
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL KABUPATEN & KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 30. <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>
- Yandra, A., Nasution, S. R., Harsini, H., & Wekke, I. S. (2018). Mainstreaming Regional Budget (APBD): Issues and Challenges in Riau Province in 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.15294/jpi.v3i1.11510>
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 465–472. <https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1161>